

**PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT
SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

Astrid Damayanti

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Ardi Hamzah

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Abstraksi: *Perubahan sistem pengadaan barang/jasa dari cara lama ke sistem pengadaan elektronik, mau tidak mau memerlukan perubahan dalam pengendaliannya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara “manual” menjadi kegiatan yang didasarkan pada teknologi informasi, khususnya media internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan e-procurement dalam masalah harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, security atau keamanan, prosedur atau SOP sebagai alat pengendalian barang/jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan meliputi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah harga kontrak pembelian, waktu proses pembelian, security/ keamanan, dan prosedur atau SOP), sedangkan variabel dependen adalah pengendalian. Sampel penelitian adalah panitia pengadaan barang/jasa e-Procurement. Teknik analisis yang digunakan dengan statistik deskriptif dan regresi linier. Hasil deskripsi statistik menunjukkan bahwa harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan, dan prosedur atau SOP menunjukkan bahwa masing-masing memiliki nilai maximum, minimum, mean, dan standar deviasi. Selain itu dilihat dari deskripsi hasil jawaban kuisisioner, responden cenderung setuju dengan pertanyaan yang diajukan peneliti. Dengan kata lain, harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan, dan prosedur atau SOP dapat dikatakan baik. Pengujian dengan regresi simultan menunjukkan secara bersama-sama harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan, dan prosedur atau SOP berpengaruh secara signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa. Pengujian dengan regresi parsial menunjukkan waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian pengadaan barang/jasa, sedangkan harga kontrak pembelian, keamanan, dan prosedur atau SOP tidak berpengaruh secara signifikan. Harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan dan prosedur atau SOP memberikan kontribusi sebesar 42%*

pada pengendalian pengadaan barang/jasa, sedangkan 58% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

Kata Kunci: Harga Kontrak Pembelian, Waktu Proses dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Keamanan, Prosedur atau SOP, Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pola hidup masyarakat makin bersifat praktis dan serba cepat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dibuktikan dengan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat, terutama teknologi internet. Dengan internet, semua akses informasi akan lebih mudah, cepat dan akurat. Berbagai kelebihan tersebut, maka pemerintah turut serta memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan mengembangkan *e-Government*.

Pengertian dari *e-Government* sendiri menurut World Bank adalah "*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Ide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government*". Secara singkat, dapat dikatakan bahwa *e-Government* merupakan sebuah konsep atau aplikasi yang digunakan pemerintah sebagai penunjang teknologi informasi melalui media internet kepada stakeholder.

Berkaitan dengan hal itu maka wujud dari pelaksanaan *e-Government* pada suatu instansi pemerintah adalah dilakukannya *e-Procurement*. *E-procurement* adalah sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis *web*.

Permasalahan yang ada sebelum digerakkannya *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa konvensional terkait dengan korupsi. Berdasarkan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih dari 70 persen nya adalah praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Faktor-faktor yang menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai ladang subur praktek korupsi. Diantaranya adalah banyaknya uang yang beredar, tertutupnya kontak antara penyedia jasa dan panitia lelang dan banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti. Banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau pura-pura transparansi tapi yang dilibatkan hanya "orang dalam". Proses pengadaan ini walaupun tercium adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tetapi pembuktiannya sangat sulit karena sistem administrasi dari pemberian dan penerima pekerjaan ini sangatlah rapi (Dirtektorat Penelitian dan Pengembangan, 2007)

Proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah sebenarnya telah diatur secara rinci dalam Keppres nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perbaikannya melalui Keppres nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres 80/2003.

e-Procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa secara on line melalui internet sehingga proses pendaftaran, perlelangan dan segala yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dapat dikerjakan tanpa sarana kertas. Menurut Kartiningrum (2008), tujuan dari *e-Procurement* sendiri adalah : a) memudahkan *sourching*, proses pengadaan dan pembayaran b) komunikasi on-

line antara *Buyers* dengan *Vendors* c) mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan d) menghemat biaya dan mempercepat proses.

Dalam kaitan proyek atau tender yang selama ini sering dituding sebagai biang keladinya korupsi, kolusi, dan nepotisme diharapkan dapat diminimalisir dengan lelang melalui internet (*e-procurement*). Lelang melalui internet dinilai lebih transparan dan menghemat biaya. Pentingnya penerapan *e-procurement* pada suatu instansi pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah sebagai salah satu sarana untuk meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perubahan sistem pengadaan barang/jasa dari cara lama ke sistem pengadaan elektronik, mau tidak mau memerlukan perubahan dalam pengendaliannya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara "manual" menjadi kegiatan yang didasarkan pada teknologi informasi, khususnya media *website*. Proses yang semula dilakukan secara manual dapat dikelola secara optimal dari segi keakuratan data yang lebih terjamin, serta penghematan atas pengeluaran yang terjadi dalam kesalahan tulis manual dapat diminimalisasi. Perubahan ini dilihat dari faktor harga pembelian, waktu proses pembelian, keamanan, prosedur (SOP) turut berubah pula.

Pengendalian merupakan dasar untuk memastikan apakah sistem yang telah dikerjakan telah aman dan mencegah serta mendeteksi adanya penyimpangan serta "*fraud*". Dalam hal ini, harga pembelian, waktu proses pembelian, keamanan, prosedur atau Standart Operating Procedure (SOP), struktur organisasi, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam pengendalian pada Pemerintah Kota Surabaya. Dimana acuan dasar penelitian ini terdapat dalam Keppres 80 tahun 2003.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian pengendalian terkait dengan *e-procurement*. Mengingat penerapan *e-Procurement* saat ini masih terus dilakukan optimalisasi dan dikarenakan masih belum banyak yang melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pengaruh penerapan *e-procurement* sebagai alat pengendalian pengadaan barang/ jasa. Penerapan *e-procurement* yang diteliti adalah ditinjau dari segi harga kontrak pembelian, waktu proses pembelian, keamanan, dan prosedur atau SOP yang telah dilaksanakan pada instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-procurement* dalam masalah harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, *security* atau keamanan, prosedur atau SOP sebagai alat pengendalian barang/jasa baik secara parsial maupun simultan.

Manfaat Penelitian

1. Memberi masukan bagi pihak yang terkait dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern untuk kegiatan *e-procurement* khususnya pada Pemkot Surabaya dan umumnya pada organisasi sektor publik.
2. Menambah literatur mengenai aktivitas yang terjadi pada sektor publik khususnya sistem pengendalian intern terkait dengan *e-procurement*.

3. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran mengenai sistem pengendalian intern terkait dengan *e-procurement* dalam rangka memberantas KKN dan meningkatkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas serta *Value for Money* (ekonomis, efektif, dan efisien).

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Definisi dari pengadaan barang/jasa, khususnya dalam lingkungan pemerintahan, seperti dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah, adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swasembada maupun oleh penyedia barang dan jasa. Menurut Bodnar dan Hopwood (2003:417), langkah-langkah umum dalam proses pengadaan adalah :

- 1) Penentuan Persyaratan
Tahap yang paling awal adalah permohonan pembelian. Permohonan pembelian adalah dokumen internal yang dibuat untuk meminta pengadaan sesuatu sehingga tersedia pada titik tertentu. Permohonan pembelian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan otomatis dengan sistem perencanaan material *materials requirements planning*. Saat selesai permohonan pembelian diteruskan ke penyedia untuk persetujuan.
- 2) Pemilihan Sumber
Langkah berikutnya adalah menugaskan sebuah sumber untuk memasok permohonan pembelian. Yang kemudian diperiksa apakah ada sebuah kontrak dengan pemasok untuk memasok barang yang diminta. Bila ada, maka hanya menyediakan jumlah yang dibutuhkan. Dan bila tidak, maka disiapkan dokumen permintaan penawaran.
- 3) Permintaan Penawaran
Setelah pemasok dipilih. Lalu membuat sebuah dokumen permintaan penawaran. Sebuah permintaan untuk penawaran dibuat untuk barang atau jasa dengan biaya tinggi atau untuk barang atau jasa di mana penawarannya dibutuhkan sebagai kebijakan perusahaan. Ini adalah dokumen yang dikirimkan kepada pemasok yang mengundang mereka untuk mengkonfirmasi harga dan cara pembayaran untuk pasokan sebuah produk atau jasa.
- 4) Pemilihan Pemasok
Langkah berikutnya adalah membandingkan kebutuhan pengadaan dengan penawaran pemasok saat mereka catat dalam dokumen penawaran, lalu diidentifikasi penawaran mana yang paling sesuai untuk permohonan tersebut. Evaluasi pemasok sering membutuhkan keahlian atau pengalaman, kebanyakan penilaian pemasok didasarkan pada sistem poin.
- 5) Membuat Pesanan Pembelian
Selanjutnya perusahaan membuat dokumen pesanan pembelian. Dimana dokumen ini untuk mengidentifikasi seorang pemasok, mengkonfirmasi barang yang dipesan, jumlah, harga, tanggal pengiriman, cara pengiriman, dan cara pembayaran. Kontrak adalah perjanjian garis besar di mana seorang pemasok menyediakan bahan untuk suatu periode waktu.

- 6) **Penerimaan Barang**
Saat pemasok membuat pengiriman, sebuah dokumen penerimaan barang disiapkan sebagai dokumen laporan penerimaan. Dokumen ini disiapkan saat sebuah item dikirimkan dari sumber dalam dan juga saat terjadi pemindahan inventaris (memindahkan satu barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya). Dokumen penerimaan barang bisa disiapkan dengan tiga cara berbeda, antara lain: 1) Dengan sistem manajemen inventaris, saat barang diberikan kepada penyimpanan sementara. Setelah barang dikirimkan dan diperiksa serta dicatat, penerimaan barang selesai, 2) Dengan mereferensikan kepada pesanan pembelian. Langkah ini dilakukan dengan memenuhi dokumen penerimaan barang menggunakan informasi dalam pesanan pembelian dan mengupdate pesanan pembelian untuk barang yang diterima, 3) Diposkan ke dalam pemeriksaan mutu. Barang tidak bias digunakan hingga diperiksa dan disahkan. Bila lolos, pembuatan pos transfer dimasukkan untuk memindahkan dari pemeriksaan mutu ke persediaan yang tersedia.
- 7) **Verifikasi faktur**
Tahap ini dilakukan untuk menjamin bahwa persyaratan biaya dan jumlah telah terpenuhi. Pemeriksaan dilakukan dengan penyesuaian tiga cara yang membandingkan pesanan pembelian dengan penerimaan barang dan dengan faktur.
- 8) **Pembayaran Pemasok**
Pembayaran dibuat sesuai dengan cara pembayaran dan kondisi yang disebutkan dalam pesanan pembelian atau catatan induk pemasok.

E-Procurement

Meskipun terdapat berbagai pendapat dan definisi mengenai *e-procurement* namun pada umumnya praktisi mendefinisikan *e-procurement* sebagai suatu proses dimana seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik dan sebagian besar barang dan jasa dibeli secara elektronik.

Pengertian e-Procurement sesuai (PERWALI 14,2007) adalah sistem pengadaan barang/jasa yang didalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi rangkaian proses pemilihan penyedia barang/jasa yang meliputi: 1) E-Tendering, adalah pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi; 2) E-Selection, adalah seleksi umum dalam rangka pengadaan jasa konsultasi yang prosesnya dilakukan secara elektronik. Tujuan *e-Procurement* adalah: 1) Memudahkan sourcing, proses pengadaan, dan pembayaran; 2) Komunikasi On-line antara Buyers dengan Vendors; 3) Mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; 4) Menghemat biaya dan mempercepat proses.

Pihak yang terkait dalam *E-Procurement* terdapat dua pihak yang terkait secara langsung dalam proses *e-procurement* pemerintah. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. *Buyers*, atau pihak instansi yang menyelenggarakan pelaksanaan *e-procurement*

2. *Vendors*, atau pihak penyedia barang/jasa. Pihak inilah yang nantinya akan diseleksi oleh *buyers* dan ditentukan siapa yang lolos untuk mengikuti proses tender dan menjalin kontrak dengan pemerintah.

Proses *e-procurement*, Secara praktek tiap negara dapat mengaplikasi *e-procurement*-nya berbeda tergantung dari kondisi dan situasi negara masing-masing. Akan tetapi menurut Graham dalam Sulinar (2006) pada umumnya *e-procurement* dibagi dalam 4 tahap yaitu :

1. *Access to information about contract*

Bagi *vendors* yang berminat mengikuti proses tender dapat mengakses informasinya dengan mengunjungi situs *e-Procurement* Pemerintah.

2. *Pre-qualification*

Bagi *vendors* yang memiliki barang/jasa sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan *buyers* dalam hal ini pemerintah, dapat meneruskan dengan mengirimkan data-data perusahaan yang berhubungan melalui situs internet, misalnya perizinan usaha, kualifikasi barang yang dimiliki dan lain-lain. Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh *buyers* untuk mengumpulkan data informasi tentang siapa saja *vendors* yang berminat, kemudian akan disaring siapa yang layak mengikuti proses tender tersebut.

3. *Tendering*

Dikatakan banyak pihak bahwa proses tender merupakan proses inti dari *e-procurement*. *Tendering* atau biasa disebut dengan proses lelang merupakan proses dimana *vendors* menawarkan barang/jasa kepada *buyers*. Ada dua hal yang membuat *buyers* mengambil keputusan dalam memilih *vendors*. Pertama, *vendors* yang dapat memberikan harga terendah atau kedua karena adanya penawaran ekonomis yang menguntungkan.

4. *Qualification and Debriefing*

Tahap terakhir adalah kualifikasi dan wawancara (namun untuk wawancara, hanya diterapkan di sebagian kecil negara). Kualifikasi yaitu memeriksa kembali *supplier* yang telah memenangkan tender, baik dari segi administrasi ataupun barang/jasa yang ditawarkan. Sebelum akhirnya kontrak ditandatangani, proses pembelian barang/jasa dilakukan dan transfer pembayaran. *Debriefing* adalah proses wawancara *supplier* yang kalah dalam proses tender.

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern mempunyai beberapa pengertian, baik dalam arti sempit dan luas (Hartadi 1999:2). Dalam arti sempit, pengendalian intern merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti misal mencocokkan penjumlahan. Sedangkan dalam arti luas, pengendalian intern dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Menurut Boynton (2002:373), Definisi pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring of Treadway Commission (COSO)* adalah :

Suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Boynton (2002:373) konsep fundamental yang melekat pada definisi pengendalian intern yang tercantum dalam laporan COSO adalah:

- 1) Pengendalian intern merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan tidak ditambahkan ke dalam, infrastruktur suatu entitas.
- 2) Pengendalian intern dilaksanakan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya.
- 3) Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan pengendalian.
- 4) Pengendalian intern diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Meskipun terdapat berbagai macam pendapat pengertian pengendalian dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengusahakan agar aktivitas dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan mengarah pada sasaran yang ditetapkan serta menghindari penyimpangan dari rencana atau tujuan. Sehingga penyimpangan berupa sanksi perundang-undangan, penipuan dan penggelapan, dan lain sebagainya dapat diminimalisir.

Sedangkan lima komponen pengendalian intern

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)
Lingkungan pengendalian menetapkan kondisi suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya dan memperbaiki efektivitas kebijakan dari prosedur-prosedur tertentu. Faktor-faktor itu mencakup: Struktur organisasi, Filosofi dan gaya operasional manajemen, Pelimpahan wewenang & tanggung jawab dan lain-lain.
2. Penilaian resiko (*Risk Assessment*)
Penilaian resiko merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas. Sehingga dengan adanya penilaian resiko dapat diminimalkan.
3. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*)
Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Biasanya aktivitas pengendalian terkait dengan pemisahan tugas yang cukup
4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)
Merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan (*Monitoring*)
Pemantauan berkaitan dengan penelitian kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu.

Unsur Pengendalian dalam Lingkungan Pengolahan Data Elektronik menurut Mulyadi (2001:183) antara lain:

1. Pengendalian umum (*general control*), unsur pengendalian umum meliputi: organisasi, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data.
2. Pengendalian aplikasi (*application control*), pengendalian ini dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap aplikasi. Pengendalian aplikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengendalian preventif dimana pengendalian ini untuk mencegah terjadinya masalah pengolahan data elektronik. Sedangkan yang kedua adalah pengendalian detektif dimana pengendalian ini akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah.

Pengaruh Penerapan E-Procurement Sebagai Alat Pengendalian Barang/Jasa

Tahapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik tidak berbeda dengan pengadaan barang dan jasa secara manual, yaitu meliputi tahap pemesanan barang dari bagian yang membutuhkan barang/ pengguna jasa, tahap pemesanan, dan tahap pembayaran. Perbedaannya hanya terletak pada pemesanan saja yang dilakukan secara elektronik dan tidak menggunakan kertas atau dokumen. Dengan perbedaan tersebut tentunya pengendalian intern yang harus dibangun oleh organisasi berbeda dengan pengadaan barang dan jasa manual.

Hal tersebut dikarenakan ada unsur penggunaan teknologi informasi dalam hal ini media internet pada proses pengadaan barang dan jasa. Pengolahan data secara elektronik selain memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi juga memberikan peluang terjadinya kejahatan komputer. Untuk itu dalam penerapan *e-procurement* dibutuhkan pengendalian untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-procurement* telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP (*System Operating Procedur*).

Untuk menghindari kemungkinan adanya kecurangan dengan memakai sistem *online* melalui internet, maka diperlukan sistem pengendalian yang dapat memberikan tingkat keyakinan yang memadai. Dimana suatu instansi pemerintah atau perusahaan memiliki *password* untuk melindungi datanya. Dalam *e-procurement supplier* yang berminat mengikuti proses *tender* mempunyai *password* atau *no ID User* sendiri yang tidak dapat diketahui pihak luar. Semakin banyak instansi pemerintah atau perusahaan yang berbagi informasi secara elektronik, maka yang diharapkan adalah dapat mengamankan informasinya dengan memberikan *password* yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terkait.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengendalian intern telah dilakukan sebelumnya oleh Hertanti (2006) terkait dengan penerapan sistem Pemrosesan Data Elektronik (EDP) untuk menunjang proses pengendalian internal siklus pendapatan pada PT. Merpati Nusantara Distrik Surabaya. Hasil penelitiannya menunjukkan belum memadainya proses pengendalian internal dalam siklus pendapatan PT. Merpati Nusantara distrik Surabaya dalam aspek keorganisasian, akses kontrol dan *ID User*, aspek dokumentasi yang berhubungan perubahan sistem, aspek pengendalian masukan belum menggunakan slip berjalan, aspek pengendalian pengolahan data yang belum menciptakan sistem *on-line* menggunakan *System Application Product* (SAP) dengan para agen dan *counter-counter*.

Sedangkan, untuk penelitian mengenai *e-procurement* telah dilakukan sebelumnya oleh Hernusa (2007) melakukan evaluasi penerapan sistem

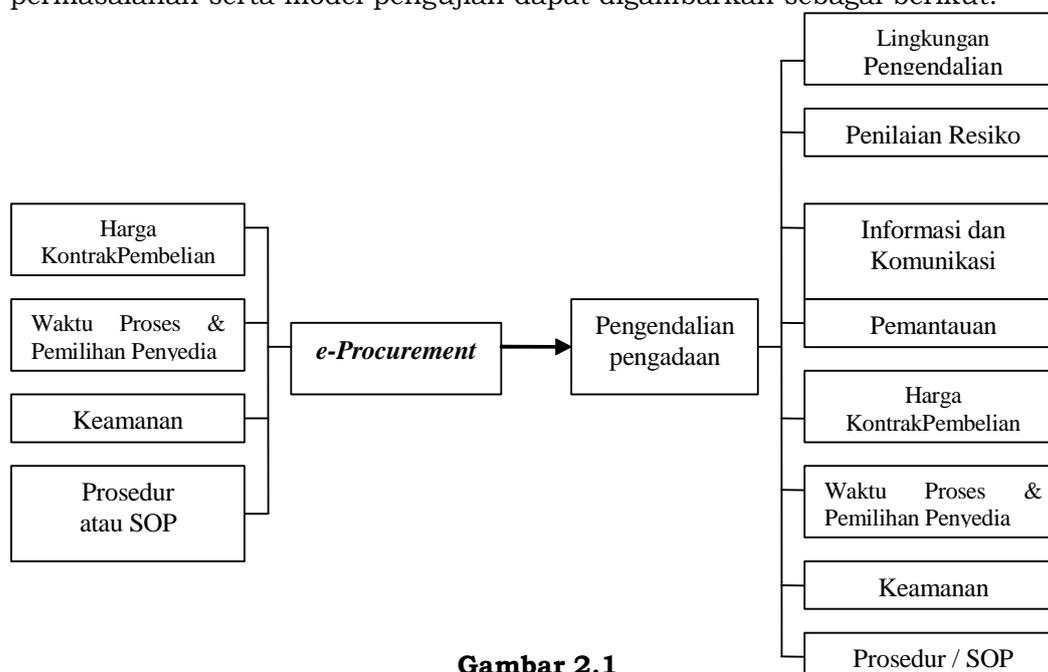
pengadaan barang/jasa secara *on-line* (*e-procurement*) pada PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa sistem pengadaan barang/jasa secara *on-line* belum berjalan secara efektif. Adapun faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah pemisahan tugas dan pemisahan tanggung jawab pada keanggotaan panitia belum tegas, terdapat otorisasi yang berlapis-lapis dalam kegiatan barang/ jasa secara *on-line*, sistem pengadaan barang/jasa secara *on-line* belum diketahui secara luas oleh masyarakat umum, dan lain-lain

Berdasarkan penelitian tersebut maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Hertanti (2006) adalah meneliti terkait dengan proses pengendalian intern. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya Hernusa (2007) adalah meneliti terkait sistem pengadaan barang/jasa secara *on-line* (*e-procurement*) dan obyek penelitannya dilakukan pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Hertanti (2006) adalah menggunakan variabel sistem pemrosesan data elektronik untuk menunjang pengendalian internalnya. Selain itu obyek penelitian tersebut diteliti pada perusahaan swasta. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya Hernusa (2007) adalah hanya berfokus pada evaluasi sistem pengadaan barang/ jasa secara *on-line* saja yang ada pada perusahaan tersebut.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini untuk melihat pengaruh sistem pengadaan barang jasa elektronik (*e-procurement*) sebagai alat pengendalian pengadaan barang jasa. Secara skematis, desain penelitian untuk menggambarkan alur permasalahan serta model pengujian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Sumber: Data diolah

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tujuan, dan landasan teori, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Harga kontrak pembelian dalam *e-Procurement* berpengaruh secara signifikan sebagai alat pengendalian barang/jasa.
- H2 : Waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa dalam *e-Procurement* berpengaruh secara signifikan sebagai alat pengendalian barang/jasa.
- H3 : *Security*/keamanan dalam *e-Procurement* berpengaruh secara signifikan sebagai alat pengendalian barang/jasa.
- H4 : Prosedur atau SOP dalam *e-Procurement* berpengaruh secara signifikan sebagai alat pengendalian barang/jasa.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode atau alat statistik deskriptif dan regresi linear dimana statistik deskriptif akan memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data responden sesuai dengan kenyataan pada waktu data diperoleh dari responden berupa dokumen-dokumen terkait dengan *e-procurement*, hasil wawancara dan observasi (Indriantoro; 2002). Sedangkan untuk regresi linear akan menguji hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval. Menurut Sugiyono (2007), analisis ini digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dirubah-rubah atau dinaik-turunkan.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah aparatur Pemerintah Kota Surabaya yang pernah melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa. Untuk sampel yang digunakan adalah pengguna barang/jasa. Dalam hal ini adalah aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bertugas khusus pada bagian panitia pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berjumlah 30 orang.

Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah *e-procurement* (harga kontrak pembelian, waktu proses pembelian, *security*/ keamanan, dan prosedur atau SOP), sedangkan variabel dependen adalah pengendalian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian, maka variabel – variabel tersebut didefinisikan secara operasional dan diukur sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) adalah sebagai suatu proses dimana seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik dan sebagian besar barang dan jasa dibeli secara

- elektronik. Variabel ini diperoleh dengan kuisioner dengan terdiri dari empat variabel yang masing-masing variabel adalah
- a. Harga kontrak pembelian (efektif) dengan tujuh item pertanyaan yang mengandung unsur biaya administrasi, biaya proses, harga kontrak
 - b. Waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa (efisien) dengan lima pertanyaan yang mengandung unsur tahap lelang, tatap muka, dan waktu proses lelang.
 - c. Keamanan dengan enam pertanyaan yang mengandung unsur aspek keamanan, kerahasiaan dan jaminan.
 - d. Prosedur atau SOP dengan enam item pertanyaan yang mengandung unsur prosedur baku, integrasi, dan sosialisasi.
2. Pengendalian sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi dimana diarahkan untuk menjamin ketelitian dan dapat dipercayanya data-data yang telah ada, melindungi harta, menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan dan lain sebagainya. Variabel ini diperoleh dengan terdiri dari empat belas item pertanyaan yang mengandung harga ontrak, waktu proses pemilihan penyedia barang/jasa, prosedur, struktur organisasi, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui metode wawancara, dan penyebaran kuisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah ada sebelum kita melakukan penelitian yaitu dengan mereview dokumentasi proyek, studi pustaka dan lain-lain.

Teknik Analisis

Setelah data dikumpulkan maka langkah selanjutnya melakukan tahap analisis. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan regresi berganda. Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada item-item pertanyaan serta uji asumsi klasik berupa normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas terhadap variabel-variabel penelitian. Analisis data meliputi pengujian instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda yang persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + B X_1 + B X_2 + B X_3 + B X_4 + e$$

Dimana :

- Y : Variabel dependen yaitu pengendalian
 X1 : Variabel independent yaitu harga kontrak pembelian
 X2 : Variabel independent yaitu waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa
 X3 : Variabel independent yaitu keamanan
 X4 : Variabel independent yaitu prosedur atau SOP
 A : konstanta
 B : koefisien regresi untuk X1-X4
 E : Standar error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstraknya. Untuk pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik Cronbach alpha. Untuk variabel Y, dimana sebelumnya terdapat 14 item setelah diuji validitasnya ternyata ada hasil yang tidak valid (Y1, Y7, Y13, Y14) sehingga setelah variabel tersebut dikeluarkan jumlah item 10 maka untuk variabel Y dapat dikatakan valid. Untuk variabel X1, dimana sebelumnya 7 item setelah diuji validitasnya ternyata ada hasil yang tidak valid (X1.4, X1.6) sehingga setelah variabel tersebut dikeluarkan jumlah item 5 dapat dikatakan valid. Namun untuk uji reliabel X1 belum dikatakan reliabel, sehingga dilakukan pengurangan variabel item lagi (X1.3) sehingga hasil X1 dengan 4 item dikatakan valid dan reliabel. Untuk variabel X2, dimana sebelumnya terdapat 5 item setelah diuji validitasnya ternyata ada hasil yang tidak valid (X2.5) sehingga setelah variabel tersebut dikeluarkan jumlah item 4 maka untuk variabel X2 dapat dikatakan valid. Untuk variabel X3 dan X4. Hasil pengujian menunjukkan data kuisioner adalah reliabel. Dengan kata lain, data kuisioner yang terdapat pada tabel 4.1. adalah valid dan reliabel.

Sisipkan Tabel 4.1

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,464. Nilai ini jauh diatas 0,5 yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini adalah normal. Untuk pengujian multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value*, bila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance value* lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Pada pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan residual dengan variabel bebas menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada data penelitian.

Sisipkan Tabel 4.2

Hasil Pengujian Regresi

Pengujian regresi dilakukan dengan pengujian regresi parsial dan pengujian simultan. Hasil pengujian regresi, baik secara parsial maupun simultan dapat dilihat pada tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3
Hasil Uji Parsial

Variabel	Sig.	keterangan
Harga Kontrak Pembelian (X1)	0,182	Tidak ada pengaruh
Waktu Proses dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (X2)	0,029	ada pengaruh
Keamanan (X3)	0,273	Tidak ada pengaruh
Prosedur atau SOP (X4)	0,239	Tidak ada pengaruh

Jika signifikansi $> 0,05$ berarti terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika signifikansi $< 0,05$ berarti tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil pengujian regresi parsial menunjukkan bahwa harga kontrak pembelian tidak berpengaruh secara signifikan pada pengendalian dengan nilai signifikansi sebesar 0,182. Hasil ini tidak mendukung hipotesis H_1 . Pengaruh harga kontrak pembelian tidak signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa dikarenakan kurangnya proses pengorganisasian dan penafsiran terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan harga kontrak pembelian barang/jasa. Selama ini yang terjadi hanya berupa “omongan atau selentingan” beberapa panitia. Informasi yang lengkap tentang harga kontrak pembelian seperti berapa harga barang/jasa yang turun setelah menggunakan *e-Procurement*, belum banyak diketahui persentasenya oleh beberapa panitia *e-Procurement*. Panitia yang mengetahui berapa besar penurunan harga barang/jasa cenderung pada panitia yang aktif dan terlibat langsung pada saat buka sampul penawaran harga.

Untuk waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa menunjukkan pengaruh yang signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,029. Hasil ini mendukung hipotesis H_2 . Pengaruh waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa yang signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa disebabkan adanya kaitan langsung antara waktu proses dan pemilihan penyedia dengan pengendalian yang tampak, seperti adanya evaluasi kinerja, pemantauan dari luar yang terkait dengan tahap-tahap pelaksanaan, periode putaran, tidak adanya tatap muka antara panitia dengan penyedia. Kegiatan itu semua selalu diulang setiap satu bulan 2 kali. Sehingga setelah adanya proses lelang dilakukan evaluasi setelah kegiatan. Selain itu, juga dikarenakan adanya profesionalisme dan tanggungjawab dalam pekerjaannya sehingga tahap-tahap pelaksanaan berjalan sesuai dengan aturan.

Untuk keamanan menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,273. Hasil ini tidak mendukung hipotesis H_3 . Pengaruh keamanan tidak signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa menunjukkan bahwa panitia pengadaan barang/jasa belum memahami pentingnya keamanan yang terjadi pada *e-Procurement* berupa jaminan tentang pihak penyedia yang harus mendaftarkan diri dengan mengirim email dan memberikan NPWP, sistem *e-Procurement* yang jika tahap berikutnya telah berjalan maka tahap sebelumnya tidak dapat di ubah. Selain itu, dapat disebabkan pula kurangnya jaminan antara panitia dengan pihak penyedia yang tidak ada tanda-tangan kontrak saat bertransaksi. Sehingga di khawatirkan panitia dan penyedia mengelak jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tak terduga.

Pengaruh prosedur atau SOP yang tidak signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa menunjukkan bahwa panitia belum memahami pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan dan ujian sertifikasi yang ada, prosedur yang berlaku, sosialisasi, dan kajian mengenai *e-Procurement* pada pihak penyedia dan masyarakat. Dengan belum adanya pemahaman mengenai prosedur atau SOP, maka pengendalian pengadaan barang/jasa masih adanya rasa malas untuk memahami dan mengerti tentang prosedur atau SOP yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian secara parsial yang menunjukkan hanya waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa berpengaruh secara signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa, menempatkan waktu proses dan

pemilihan penyedia barang/jasa sebagai variabel yang berpengaruh dominan terhadap. Pengaruh dominan waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa pada pengendalian pengadaan barang/jasa tersebut erat kaitannya dengan diri sendiri yang bekerja dengan profesionalisme dan tanggung jawab dengan pekerjaannya dalam kaitan memilih waktu proses dan pemilihan penyedia.

Dengan pengujian regresi simultan menunjukkan bahwa harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan dan prosedur atau SOP pada berpengaruh secara signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa. Ini ditunjukkan dengan nilai F-hitung sebesar 5,979 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai R^2 sebesar 42% menunjukkan bahwa harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan dan prosedur atau SOP memberikan kontribusi sebesar 42% pada pengendalian pengadaan barang/jasa, sedangkan 58% disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti profesionalisme dan tanggung jawab, transparansi, partisipasi antar panitia, pelatihan pengadaan barang/jasa untuk panitia, keadilan/kepatuhan hukum, informasi dan komunikasi, efisien dan efektif, evaluasi *e-Procurement*, jaminan transaksi, dan lain-lain.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN. DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian secara simultan (F test) menunjukkan menunjukkan bahwa harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan dan prosedur atau SOP pada berpengaruh secara signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa.
2. Harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan dan prosedur atau SOP memberikan kontribusi sebesar 42% pada pengendalian pengadaan barang/jasa, sedangkan 58% disebabkan oleh faktor-faktor lain.
3. Pengujian secara parsial menunjukkan waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa berpengaruh secara signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa dengan hasil pengujian nilai signifikansi $< \alpha 0,05$, sedangkan harga kontrak pembelian, keamanan, dan prosedur atau SOP tidak berpengaruh secara signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa dengan hasil pengujian nilai signifikansi $> 0,05$.

Keterbatasan

1. Variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan dan prosedur atau SOP, padahal masih ada variabel-variabel lain yang terkait dengan pengendalian pengadaan barang/jasa.
2. Responden yang digunakan pada penelitian ini hanya pada panitia pengadaan barang/jasa dengan jumlah sampel sebanyak 38 responden.
3. Konstruksi dalam penelitian ini antara variabel independen dan variabel dependen ada beberapa yang sama. Akan tetapi, makna dari tiap variabel (independen dan dependen) tersebut berbeda. Dengan dilihat dari tiap item pertanyaan kuisioner yang diajukan. Dimana untuk variabel

independen terkait pertanyaan dengan masalah *e-Procurement* sedangkan untuk variabel dependen terkait dengan permasalahan pengendalian. Untuk harga kontrak terdapat pada item pertanyaan nomor 9, waktu proses nomor 4 sampai 6, keamanan nomor 1, dan prosedur atau SOP nomor 2 dan 3.

Makna yang berbeda tersebut belum dapat dibuat nama konstruk dikarenakan belum ada nama konstruk yang menyerupai. Dengan kata lain, penelitian ini bersifat kuantitatif akan tetapi konstruk tidak berpegang pada satu makna saja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya harga kontrak pembelian, waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa, keamanan dan prosedur atau SOP, padahal masih ada variabel-variabel lain yang terkait dengan pengendalian pengadaan barang/jasa.
2. Responden yang digunakan pada penelitian ini relatif kurang karena hanya tertuju pada panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar dan Hopwood. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Kedelapan Jilid I*. Jakarta: Indeks
- Boynton,dkk. 2002. *Modern Audit Edisi Ketujuh Jilid I*. Jakarta: Erlangga
- Hamzah, Ardi.2008. *Sistem Pendidikan Masyarakat berbasis Mentalitas, Kreativitas, dan Sosiologi Kritis: Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bangkalan: Papper Universitas Trunojoyo
- Hartadi, Bambang. 1999. *Sistem Pengendalian Intern dalam Manajemen dan Akuntansi*
- Hernusa, Hardini Lestiani. 2007. *Evaluasi Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Secara On-Line (e-Procurement) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim*. Surabaya: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Hertanti, Dwi. 2006. *Penerapan Sistem Pemrosesan Data Elektronik (EDP) untuk Menunjang Proses Pengendalian Internal Siklus Pendapatan pada PT. Merpati Nusantara Distrik Surabaya*. Surabaya: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Herwati, S.Fifi. 2007. *Kajian Tentang Pengendalian Intern Proses Pengadaan Baranag/jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement)*. Surabaya: Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Pubilk Pertama UPN V Jatim
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Kartiningrum. 2008. *Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pengadaan Barang pada Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Surabaya*. Surabaya: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara
- Levine,Paul, dkk. 2000. *Public Sector Procurement: Lump-Sum Payments or Optimal Contracts*. University of Surrey

- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Ke-3*. Jakarta: Salemba Empat
- Pratolo, Surya. 2007. *Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia : Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta Tinjauan pada Jenis Perusahaan*. Makasar: Simposim Nasional Akuntansi X
-, Keputusan Presiden Republik Inonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Jasin, Mochammad, dkk, 2007. *Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement*. Jakarta: Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Jasin, Mochammad, dkk, 2007. *Memahami Untuk Melayani*. Jakarta: Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Ke-3*. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso, Singgih. 2008. *Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA
- Sulinar, Nurliya. 2007. *Analisis Kepuasan Users pada Penerapan Sistem e-Procurement Pemkot Surabaya*. Surabaya: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Susanti Lucyana. 2007. *Pengaruh Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)*. Bangkalan: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo
- Jusup, Al Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan) Buku 1*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

www.surabaya-eproc.or.id

www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm

LAMPIRAN

Lampiran 4.1 Hasil Pengujian validitas dan Reliabilitas Pengendalian (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,793	10

		Correlations										
		Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	TotalYR1
Y2	Pearson Correlation	1	,144	,009	,254	,530**	,413**	,038	,085	,422**	,444**	,502**
	Sig. (2-tailed)		,388	,956	,123	,001	,010	,822	,613	,008	,005	,001
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Y3	Pearson Correlation	,144	1	,442**	,637**	,342*	,499**	,083	,190	,484**	,151	,643**
	Sig. (2-tailed)	,388		,005	,000	,036	,001	,619	,254	,002	,365	,000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Y4	Pearson Correlation	,009	,442**	1	,653**	,185	,315	-,076	,496**	,215	,061	,498**
	Sig. (2-tailed)	,956	,005		,000	,266	,054	,649	,002	,195	,714	,001
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Y5	Pearson Correlation	,254	,637**	,653**	1	,510**	,476**	,079	,251	,516**	,228	,746**
	Sig. (2-tailed)	,123	,000	,000		,001	,003	,636	,129	,001	,168	,000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Y6	Pearson Correlation	,530**	,342*	,185	,510**	1	,587**	,427**	,093	,517**	,693**	,825**
	Sig. (2-tailed)	,001	,036	,266	,001		,000	,008	,578	,001	,000	,000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Y8	Pearson Correlation	,413**	,499**	,315	,476**	,587**	1	,112	,232	,350*	,538**	,696**
	Sig. (2-tailed)	,010	,001	,054	,003	,000		,504	,160	,031	,000	,000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Y9	Pearson Correlation	,038	,083	-,076	,079	,427**	,112	1	-,209	,205	,506**	,393*
	Sig. (2-tailed)	,822	,619	,649	,636	,008	,504		,208	,217	,001	,015
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Y10	Pearson Correlation	,085	,190	,496**	,251	,093	,232	-,209	1	,284	,077	,400*
	Sig. (2-tailed)	,613	,254	,002	,129	,578	,160	,208		,084	,648	,013
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Y11	Pearson Correlation	,422**	,484**	,215	,516**	,517**	,350*	,205	,284	1	,454**	,732**
	Sig. (2-tailed)	,008	,002	,195	,001	,001	,031	,217	,084		,004	,000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Y12	Pearson Correlation	,444**	,151	,061	,228	,693**	,538**	,506**	,077	,454**	1	,683**
	Sig. (2-tailed)	,005	,365	,714	,168	,000	,000	,001	,648	,004		,000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
TotalYR1	Pearson Correlation	,502**	,643**	,498**	,746**	,825**	,696**	,393*	,400*	,732**	,683**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,001	,000	,000	,000	,015	,013	,000	,000	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Harga Kontrak Pembelian

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.5	X1.7	TotalX1R1
X1.1	Pearson Correlation	1	,159	,159	,197	,621**	,607**
	Sig. (2-tailed)		,339	,340	,236	,000	,000
	N	38	38	38	38	38	38
X1.2	Pearson Correlation	,159	1	,357*	,279	,125	,573**
	Sig. (2-tailed)	,339		,028	,089	,454	,000
	N	38	38	38	38	38	38
X1.3	Pearson Correlation	,159	,357*	1	,126	,042	,749**
	Sig. (2-tailed)	,340	,028		,452	,803	,000
	N	38	38	38	38	38	38
X1.5	Pearson Correlation	,197	,279	,126	1	,241	,482**
	Sig. (2-tailed)	,236	,089	,452		,145	,002
	N	38	38	38	38	38	38
X1.7	Pearson Correlation	,621**	,125	,042	,241	1	,567**
	Sig. (2-tailed)	,000	,454	,803	,145		,000
	N	38	38	38	38	38	38
TotalX1R1	Pearson Correlation	,607**	,573**	,749**	,482**	,567**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,002	,000	
	N	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Nilai reliabilitas setelah X1.3 dikeluarkan meningkat menjadi 0,603

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,603	4

Prosedur atau SOP

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	TotalX4
X4.1	Pearson Correlation	1	,621**	,630**	,673**	,712**	-,027	,683**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,874	,000
	N	38	38	38	38	38	38	38
X4.2	Pearson Correlation	,621**	1	,620**	,611**	,695**	,420**	,857**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,009	,000
	N	38	38	38	38	38	38	38
X4.3	Pearson Correlation	,630**	,620**	1	,685**	,633**	,236	,775**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,155	,000
	N	38	38	38	38	38	38	38
X4.4	Pearson Correlation	,673**	,611**	,685**	1	,791**	,332*	,834**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,042	,000
	N	38	38	38	38	38	38	38
X4.5	Pearson Correlation	,712**	,695**	,633**	,791**	1	,216	,814**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,192	,000
	N	38	38	38	38	38	38	38
X4.6	Pearson Correlation	-,027	,420**	,236	,332*	,216	1	,617**
	Sig. (2-tailed)	,874	,009	,155	,042	,192		,000
	N	38	38	38	38	38	38	38
TotalX4	Pearson Correlation	,683**	,857**	,775**	,834**	,814**	,617**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	38	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,795	6

Lampiran 4.2 Uji Asumsi Klasik Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Standardized Residual	
N	38	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,94440028
Most Extreme Differences	Absolute	,138
	Positive	,099
	Negative	-,138
Kolmogorov-Smirnov Z	,851	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,464	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Multikolinearitas

Heteroskedastisitas

Variabel	Korelasi Rank Spearman	Sig.	keterangan
Harga Kontrak Pembelian (X1)	-0,029	0,860	Tidak ada heteroskedastik
Waktu Proses dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (X2)	-0,117	0,483	Tidak ada heteroskedastik
Keamanan (X3)	-0,035	0,836	Tidak ada heteroskedastik
Prosedur atau SOP (X4)	-0,011	0,946	Tidak ada heteroskedastik

Lampiran 4.3 Hasil Uji Regresi Partial dan Simultan Partial

Variabel	Sig.	keterangan
Harga Kontrak Pembelian (X1)	0,182	Tidak ada pengaruh
Waktu Proses dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (X2)	0,029	ada pengaruh
Keamanan (X3)	0,273	Tidak ada pengaruh
Prosedur atau SOP (X4)	0,239	Tidak ada pengaruh

Simultan

Coefficients

Mode	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	,454	1,077		,421	,676					
Harga Kontrak Pembelian (X1)	,395	,289	,211	1,363	,182	,447	,231	,181	,733	1,364
Waktu Proses dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (X2)	,415	,181	,368	2,289	,029	,558	,370	,303	,682	1,467
Keamanan (X3)	,199	,179	,195	1,114	,273	,481	,190	,148	,576	1,738
Prosedur atau SOP (X4)	,113	,095	,162	1,199	,239	,167	-,204	,159	,958	1,044

a. Dependent Variable: Pengendalian (Y)

Persamaan regresi : $Y = 0,454 + 0,395 X1 + 0,415 X2 + 0,199 X3 + 0,113 X4$